

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

4.1.1 Profile Perusahaan Cnnindonesia.com



Gambar 4.1 Cnn Indonesia Logo
(Sumber: Cnnindonesia.com)

Company Profile CNN Indonesia (2016) Cable News Network (CNN) adalah sebuah kantor berita yang berpusat di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Perusahaan media CNN melakukan ekspansi ke berbagai negara seperti, Filipina, Turki, dan Chile, selanjutnya Indonesia menjadi salah satunya. Media CNN muncul di Indonesia dan berada di bawah naungan PT Agranet Multicitra Siberkom yang kini telah bergabung dengan PT Trans Digital Media. CNN secara resmi hadir di Indonesia pada 20 Oktober 2014 dan diberi nama CNNIndonesia.com. Tujuan CNN melakukan ekspansi ke Indonesia dengan tujuan agar dapat menjangkau lebih banyak audiens dan dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi media di Indonesia (Aprilianti, 2020).

Menurut CNN Indonesia (2016), CNN Indonesia sendiri mengawali kehadirannya di Indonesia melalui portal berita CNNIndonesia.com yang merupakan sebuah media berita online. Kemudian, CNN Indonesia mengembangkan dirinya dengan memunculkan CNN Indonesia TV tepat pada hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2015. CNN Indonesia merupakan media yang diharapkan dapat menjadi acuan mata Indonesia untuk melihat berbagai

macam aspek mata dunia. Media ini dihadirkan untuk masyarakat Indonesia yang menginginkan berbagai macam pemberitaan nasional maupun internasional yang objektif dan berkualitas (Aprilianti, 2020).

CNN Indonesia juga berusaha untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta mempertahankan standar editorial tertinggi sesuai dengan standard CNN International. Dua hal tersebut merupakan komitmen yang harus dan kana selalu diaplikasikan oleh CNN Indonesia dalam proses produksi karya jurnalistik. Berdasarkan Company Profile CNN Indonesia (2016), CNNIndonesia.com menghadirkan berita yang lugas, jelas, dan tajam dalam pembahasannya. CNNIndonesia.com berpegang pada tagline “Di titik Api Peristiwa” dan berusaha fokus untuk menghadirkan berita yang sesuai dengan fakta, dan mudah dipahami 7 oleh pembaca. Serta, CNNIndonesia juga akan mengupas peristiwa secara tajam dari berbagai sisi namun tak lepas dari makna peristiwa tersebut. Berita juga akan disertai dengan berbagai argumen yang sesuai dengan data yang ada dan konteks yang relevan. (Aprilianti, 2020).

A. Visi dan Misi Cnnindonesia.com

Visi daripada CNN Indonesia adalah mengungkapkan fakta secara apa adanya, kemudian CNN Indonesia juga akan selalu siap untuk mengabarkan berita apapun, karena media ini hadir untuk mengabarkan khalayak. Berikut adalah kutipan Misi dan Visi dari CNN Indonesia. 8 Panjang bukan berarti membosankan Pendek tidak berarti dangkal. Panjang pendek bukanlah rumus. Panjang pendek bukanlah kungkungan. Panjang dan pendek hanyalah sebuah format penyampaian. Sebuah pilihan. Dangkal dan membosankan adalah cermin ketidaktrampilan penyampainya. Bukan karena formatnya. Karena berita kami bisa panjang dan bisa pendek. Sama seperti dengan pilihan kami untuk tidak sekedar menggunakan semata kata-kata untuk menyampaikan berita. Grafis, foto, dan video adalah juga alat kami. Semua bisa saling berdiri sendiri bercerita sekaligus saling melengkapi sebagai sebuah kesatuan. Kami tak hendak menjadi hakim. Tak hendak pula menjadi algojo. Niatan kami hanyalah mengungkapkan fakta secara apa adanya. Membilasnya dari bias. Kami ada semata karena kepekaan. Ketika sebuah peristiwa, sebuah perkara, layak untuk disampaikan, menarik, dan sebisa mungkin

membuka wawasan. Ketika kegembiraan, tragedi, yang tersembunyi, dan yang terbuka perlu untuk diketahui. Kami hadir untuk mengabarkan (Yolanda, 2020).

4.1.2 Profile Perusahaan Kompas.com



Gambar 4.2 Kompas.com Logo
(Sumber: Kompas.com)

Kompas Gramedia yang disingkat KG merupakan sebuah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang media. KG sendiri berdiri pada tanggal 17 Agustus 1963, yang diawali dengan terbitnya sebuah majalah Intisari dibawah kepemimpinan P.K Ojong dan Jakob Oetama. Kompas Gramedia sendiri bergerak bersama seluruh rangkaian komponen bangsa yang terus bergerak secara dinamis melampaui setiap elemen masyarakat Indonesia, melalui lebih dari 400 jaringan usaha. Rangkaian komponen usaha yang didirikan Kompas Gramedia terbagi menjadi 8 bisnis KG yaitu Media, Retail and Publishing, Hospitality, Manufacture, Education, Event and Venue, Property, dan Digital (Epranata, 2020).

Media sebagai unit bisnis Kompas Gramedia mengedepankan kredibilitas informasi yang lengkap akurat yang disampaikan melalui lebih dari 150 merek media cetak, elektronik dan broadcast menjadikan KG sebagai perusahaan media terbesar di Indonesia. Sebagai contoh Kompas.com, Tribunnews.com, Bobo, Nova, Otomotif, Jip, serta Gridoto. Selanjutnya untuk memenuhi sektor Retail and

Publishing, memiliki 7 penerbit ternama dengan lebih dari 120 jaringan toko dalam memenuhi produk literasi bermutu dan juga produknya seperti Gramedia, Elex Media Komputindo, Grasindo, serta BIP. Di bidang Hospitality dan Manufacture Kompas sendiri turut menggerakkan lebih dari 110 jaringan hotel seperti Hotel Santika, Amaris, dan The Anvaya, kemudian untuk Manufacture Kompas Gramedia melakukan pembangunan dengan tujuan melengkapi fasilitas percetakan dan produksi kemasan yang bermutu seperti Gramedia Printing Group, Metaform, dan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia (Epranata, 2020).

Alamat Kompas Online mulai berubah menjadi www.kompas.com pada awal tahun 1996. Kompas Online berkembang menjadi unit bisnis mandiri di bawah naungan PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak perubahan alamat itu, Kompas Online kemudian disebut KCM. Kompas Online kemudian lebih dikenal dengan sebutan KCM. Hingga saat ini, pengunjung KCM tidak lagi hanya menikmati konten yang ada di replika Harian Kompas. KCM menyajikan replika terbaru dan terbaru sepanjang hari (Kompas.com, n.d. paras. 4-5). Portal berita www.kompas.com atau KC melakukan rebranding menjadi Kompas.com pada 29 Mei 2008. Rebranding ini juga menambah kanal-kanal berita dan terjadi peningkatan produktivitas sajian berita (Epranata, 2020)..

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Framing Berita Cnnindonesia.com

1. Analisis Artikel Berita 1

Judul : 58 Ribu Orang Teken Petisi Protes BPIP soal Paskibraka Lepas Jilbab

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 15 Agustus 2024

Ringkasan : Setidaknya sudah sekitar 58 ribu orang menandatangani petisi daring berisi protes terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atas dugaan meminta Paskibraka putri yang berhijab untuk lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi

Table 4.1 Analisis Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	58 Ribu Orang Teken Petisi Protes BPIP soal Paskibraka Lepas Jilbab
	Lead	Setidaknya sudah sekitar 58 ribu orang menandatangani petisi daring berisi protes terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atas dugaan meminta Paskibraka putri yang berhijab untuk lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa (13/8) lalu.
	Latar Informasi	Petisi itu digagas anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustofa di situs change.org. Dia menghimpun dukungan publik untuk meminta BPIP mencabut aturan tersebut.
	Kutipan Sumber	Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustof: <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kami meminta agar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila) mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencabut keputusan yang mewajibkan Petugas Paskibraka nasional puteri 2024 harus melepas jilbabnya," 2. "Kami mendesak teman-teman dan sesama warga negara yang peduli terhadap kebebasan beragama untuk menandatangani petisi ini dalam solidaritas dengan adik-adik muslimah kita,"
		Kasetpres Heru Budi Hartono:

Skrip

Pernyataan Opini

Penutup

What

Where

When

Who

Why

How

1. "Kalau saya tidak dilaporkan,"
2. "Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab,"

-
Penutup dari artikel berita ini adalah kutipan dari Kasetpres Heru Budi Hartono
Setidaknya sudah sekitar 58 ribu orang menandatangani petisi daring berisi protes terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atas dugaan meminta Paskibraka putri yang berhijab untuk lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa (13/8) lalu.
Jakarta
15 Agustus 2024
Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustofa
Purna Paskibraka Indonesia Ilham Mustofa menghimpun dukungan publik untuk meminta BPIP mencabut aturan hijab pada paskibraka "Kami meminta agar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila) mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencabut keputusan yang mewajibkan Petugas Paskibraka nasional putri 2024 harus melepas jilbabnya,"
Petisi itu digagas anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustofa di situs change.org. Dia menghimpun dukungan publik

		untuk meminta BPIP mencabut aturan tersebut
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyalami anggota Paskibraka yang menggunakan hijan sesuai upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN)

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pada struktur sintaksi dengan judul berita 58 Ribu Orang Teken Petisi Protes BPIP soal Paskibraka Lepas Jilbab Lead Setidaknya sudah sekitar 58 ribu orang menandatangani petisi daring berisi protes terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atas dugaan meminta Paskibraka putri yang berhijab untuk lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa (13/8) lalu. Latar Informasi Petisi itu digagas anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustofa di situs change.org. Dia menghimpun dukungan publik untuk meminta BPIP mencabut aturan tersebut. Kutipan Sumber Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustof: 1. "Kami meminta agar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila) mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencabut keputusan yang mewajibkan Petugas Paskibraka nasional puteri 2024 harus melepas jilbabnya," 2. "Kami mendesak teman-teman dan sesama warga negara yang peduli terhadap kebebasan beragama untuk menandatangani petisi ini dalam solidaritas dengan adik-adik muslimah kita," Kasetpres Heru Budi Hartono: 1. "Kalau saya tidak dilaporkan," 2. "Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan

sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," Pernyataan Opini – Penutup dari artikel berita ini adalah kutipan dari Kasetpres Heru Budi Hartono.

2. Struktur Skrip

What Setidaknya sudah sekitar 58 ribu orang menandatangani petisi daring berisi protes terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atas dugaan meminta Paskibraka putri yang berhijab untuk lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa (13/8) lalu. Where Jakarta When 15 Agustus 2024 Who Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustofa Why Dalam petisi itu, Ilham mengungkap kekecewaannya terhadap dugaan BPIP melarang Paskibraka putri yang berhijab untuk tetap memakai jilbab saat bertugas. Dia mempertanyakan alasan kebijakan itu. How Petisi itu digagas anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Ilham Mustofa di situs change.org. Dia menghimpun dukungan publik untuk meminta BPIP mencabut aturan tersebut

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyalami anggota Paskibraka 2024 se usai upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemilihan foto tersebut sesuai dengan makna dari judul berita sehingga pembaca dapat mendapatkan Gambaran terkait berita tersebut

2. Analisis Artikel Berita 2

Judul : Kepala BPIP Minta Maaf, Bolehkan Paskibraka Pakai Jilbab saat Upacara

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 15 Agustus 2024

Ringkasan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kini membolehkan Paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.

Table 4.2 Analisis Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Kepala BPIP Minta Maaf, Bolehkan Paskibraka Pakai Jilbab saat Upacara
	Lead	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kini membolehkan Paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.
	Latar Informasi	BPIP menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan di momen pengukuhan. Padahal, ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab.
	Kutipan Sumber	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi: <ol style="list-style-type: none"> 1. "Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," 2. "Menyampaikan permohonan maaf yang

	sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan."
Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
Penutup	Penutup dari artikel berita ini adalah Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab adalah kesukarelaan masing-masing.
What	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kini membolehkan Paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.
Where	Jakarta
When	15 Agustus 2024
Who	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi
Why	Dalam petisi itu, Ilham mengungkap kekecewaannya terhadap dugaan BPIP melarang Paskibraka putri yang berhijab untuk tetap memakai jilbab saat bertugas. Dia mempertanyakan alasan kebijakan itu.
How	BPIP menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab bagi

		anggota Paskibraka perempuan di momen pengukuhan. Padahal, ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto anggota paskibra di IKN

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pada struktur sintaksi dari pemberitaan dengan Judul Kepala BPIP Minta Maaf, Bolehkan Paskibraka Pakai Jilbab saat Upacara Lead Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kini membolehkan Paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Latar Informasi BPIP menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan di momen pengukuhan. Padahal, ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab. Kutipan Sumber Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi: 1. "Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," 2. "Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari

artikel berita ini adalah Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab adalah kesukarelaan masing-masing.

2. Struktur Skrip

What Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kini membolehkan Paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Where Jakarta When 15 Agustus 2024 Who Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi Why Dalam petisi itu, Ilham mengungkap kekecewaannya terhadap dugaan BPIP melarang Paskibraka putri yang berhijab untuk tetap memakai jilbab saat bertugas. Dia mempertanyakan alasan kebijakan itu. How BPIP menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan di momen pengukuhan. Padahal, ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota paskibra di IKN

3. Analisis Artikel Berita 3

Judul : Aisyiah Sentil Dalih Keseragaman Aturan Jilbab BPIP:

Tidak Toleran

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 15 Agustus 2024

Ringkasan : Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah

Orbayinah mengkritik dalih keseragaman di balik aturan BPIP yang meniadakan

opsi pengenaan jilbab bagi petugas Paskibraka putri saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 2024.

Table 4.3 Analisis Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Aisyiah Sentil Dalih Keseragaman Aturan Jilbab BPIP: Tidak Toleran
	Lead	Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah mengkritik dalih keseragaman di balik aturan BPIP yang meniadakan opsi pengenaan jilbab bagi petugas Paskibraka putri saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 2024.
	Latar Informasi	BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang dalam SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab. Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.
	Kutipan Sumber	Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah: 1. "Demi keseragaman tapi sebenarnya bentuk ketidaktoleran bagi penggunanya. Memakai jilbab pada dasarnya bentuk

pelaksanaan beragama,"

2. "Aturan tersebut sudah sepatutnya dicabut karena justru mengalami kemunduran dibandingkan aturan sebelumnya,"
3. "Alangkah baiknya jika upacara yang akan dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini mestinya diawali dengan hal-hal yang baik, bukan malah aturan yang meresahkan masyarakat,"

Ketua BPIP, Yudian Wahyudi:

1. "Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),"
2. "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,"
3. "Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan,"

Pernyataan Opini

Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini

Penutup

Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat

<p>Skrip</p> <p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p>	<p>Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah mengkritik dalih keseragaman di balik aturan BPIP yang meniadakan opsi pengenaan jilbab bagi petugas Paskibraka putri saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 2024.</p> <p>Jakarta</p> <p>15 Agustus 2024</p> <p>Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang dalam SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab.</p> <p>Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.</p>	<p>Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber</p>
<p>Tematik</p>	<p>Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</p>	<p>Terdapat foto anggota paskibra yang sedang bersalama dengan</p>
<p>Retoris</p>	<p>Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik</p>	

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pada pemberitaan online yang Judul Aisyiah Sentil Dalih Keseragaman Aturan Jilbab BPIP: Tidak Toleran Lead Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah mengkritik dalih keseragaman di balik aturan BPIP yang meniadakan opsi pengenaan jilbab bagi petugas Paskibraka putri saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 2024. Latar Informasi BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang dalam SE Deputy Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab. Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Kutipan Sumber Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah: 1. "Demi keseragaman tapi sebenarnya bentuk ketidaktoleran bagi penggunanya. Memakai jilbab pada dasarnya bentuk pelaksanaan beragama," 2. "Aturan tersebut sudah sepatutnya dicabut karena justru mengalami kemunduran dibandingkan aturan sebelumnya," 3. "Alangkah baiknya jika upacara yang akan dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini mestinya diawali dengan hal-hal yang baik, bukan malah aturan yang meresahkan masyarakat," Ketua BPIP, Yudian Wahyudi: 1. "Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," 2. "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan," 3. "Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat

Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan,"

2. Struktur Skrip

What Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah mengkritik dalih keseragaman di balik aturan BPIP yang meniadakan opsi pengenalan jilbab bagi petugas Paskibraka putri saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 2024. Where Jakarta When 15 Agustus 2024 Who Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah Why BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang dalam SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab. How Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota paskibra yang sedang bersalama dengan Jokowi yang menjadikan foto ini sebagai penekanan bagi para pembaca

4. Analisis Artikel Berita 4

Judul : Orang Tua Paskibraka Sulteng dan Maluku Sedih Lihat Anak Tak Berjilbab

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 15 Agustus 2024

Ringkasan : Orang tua Zahra Aisyah merasa kecewa dan sedih setelah melihat anaknya yang menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional tidak mengenakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo.

Table 4.4 Analisis Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Orang Tua Paskibraka Sulteng dan Maluku Sedih Lihat Anak Tak Berjilbab
	Lead	Orang tua Zahra Aisyah merasa kecewa dan sedih setelah melihat anaknya yang menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional tidak mengenakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo.
	Latar Informasi	Setelah mendapatkan kecaman dari publik, BPIP akhirnya mengizinkan 18 perwakilan daerah yang tergabung dalam Paskibraka nasional untuk dapat menggunakan hijab baik pada saat pengibaran maupun penurunan bendera. Gatot pun bersyukur BPIP mengaku kesalahan dan adanya instruksi baru penggunaan hijab bagi para Paskibraka putri.

Kutipan Sumber	ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Keseharian dia pakai jilbab. Di kegiatan yang sakral untuk kegiatan negara justru tidak memakai jilbab, kami sedih jujur saja saya sedih, miris juga dan agak kecewa juga dengan keputusan BPIP," 2. "Pakai jilbab mulai dari SD sampai SMA, dia juga sempat ikut Putri Pariwisata Morowali 2023 lalu, dan dia pakai jilbab, memang dasarnya dia pakai jilbab, kecuali kalau di rumah dia lepas," 3. "Tapi saya bersyukur bahwa tadi sudah ada instruksi presiden untuk pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera sudah diperbolehkan memakai jilbab. Alhamdulillah didengarkan keluhan kami terkait itu, <p>Kepala BPIP, Yudian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Karena memang kan dari awal Paskibraka itu seragam (seragam)," 2. "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,"
Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
Penutup	Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana

Skrip

What

nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,"

Orang tua Zahra Aisyah merasa kecewa dan sedih setelah melihat anaknya yang menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional tidak mengenakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo.

Jakarta

15 Agustus 2024

Ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto,

Where

When

Who

Why

Menurut ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto, selama ini keluarga mengajarkan kepada anak-anak mereka pondasi agama Islam terkait kewajiban menggunakan jilbab bagi perempuan. Gatot pun kecewa dengan kebijakan Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait aturan lepas jilbab.

How

BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang dalam SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab. Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata

Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto anggota paskibra yang sedang bersalama dengan Jokowi yang menjadikan foto ini sebagai penekanan bagi para pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pemberitaan dengan Judul Orang Tua Paskibraka Sulteng dan Maluku Sedih Lihat Anak Tak Berjilbab Lead Orang tua Zahra Aisyah merasa kecewa dan sedih setelah melihat anaknya yang menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional tidak mengenakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo. Latar Informasi Setelah mendapatkan kecaman dari publik, BPIP akhirnya mengizinkan 18 perwakilan daerah yang tergabung dalam Paskibraka nasional untuk dapat menggunakan hijab baik pada saat pengibaran maupun penurunan bendera. Gatot pun bersyukur BPIP mengaku kesalahan dan adanya instruksi baru penggunaan hijab bagi para Paskibraka putri. Kutipan Sumber ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto: 1. "Keseharian dia pakai jilbab. Di kegiatan yang sakral untuk kegiatan negara justru tidak memakai jilbab, kami sedih jujur saja saya sedih, miris juga dan agak kecewa juga dengan keputusan BPIP," 2. "Pakai jilbab mulai dari SD sampai SMA, dia juga sempat ikut Putri Pariwisata Morowali 2023 lalu, dan dia pakai jilbab, memang dasarnya dia pakai jilbab, kecuali kalau di rumah dia lepas," 3. "Tapi saya bersyukur bahwa tadi sudah ada instruksi presiden untuk pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera sudah diperbolehkan memakai jilbab.

Alhamdulillah didengarkan keluhan kami terkait itu, Kepala BPIP, Yudian 1. "Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," 2. "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,"

2. Struktur Skrip

What Orang tua Zahra Aisyah merasa kecewa dan sedih setelah melihat anaknya yang menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional tidak mengenakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo. Where Jakarta When 15 Agustus 2024 Who Ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto, Why Menurut ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto, selama ini keluarga mengajarkan kepada anak-anak mereka pondasi agama Islam terkait kewajiban menggunakan jilbab bagi perempuan. Gatot pun kecewa dengan kebijakan Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait aturan lepas jilbab. How BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang dalam SE Deputy Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab. Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota paskibra yang sedang bersalama dengan Jokowi yang menjadikan foto ini sebagai penekanan bagi para pembaca.

5. Analisis Artikel Berita 5

Judul : Jokowi dan BPIP Digugat Buntut Paskibraka Putri Lepas Jilbab
Sumber : Cnnindonesia.com
Tanggal : 15 Agustus 2024
Ringkasan : Dua lembaga menggugat Presiden Joko Widodo dan BPIP terkait polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab.

Table 4.5 Analisis Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Jokowi dan BPIP Digugat Buntut Paskibraka Putri Lepas Jilbab
	Lead	Dua lembaga menggugat Presiden Joko Widodo dan BPIP terkait polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab.
	Latar Informasi	Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) sekitar pukul 11.00 WIB. Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan ini

kaitannya dengan polemik pasukan Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

Kutipan Sumber

Ketua LP3HI Arif Sahudi

1. "Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP,"
2. "Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab,"
3. "Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-gesa, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab, pakai hijab,"

Kepala BPIP Yudian Wahyudi

1. "Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-

		79 di Ibukota Nusantara,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
	Penutup	Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,"
Skrip	What	Orang tua Zahra Aisyah merasa kecewa dan sedih setelah melihat anaknya yang menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional tidak mengenakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo.
	Where	Jakarta
	When	15 Agustus 2024
	Who	Ayah Zahra, Gatot Susilo Budiarto,
	Why	Menurut ayah Zahra, Gatot Susilo Budiarto, selama ini keluarga mengajarkan kepada anak-anak mereka pondasi agama Islam terkait kewajiban menggunakan jilbab bagi perempuan. Gatot pun kecewa dengan kebijakan Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait aturan lepas jilbab.
	How	BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang

Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	dalam SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab. Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto anggota paskibra yang sedang bersalama dengan Jokowi yang menjadikan foto ini sebagai penekanan bagi para pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pemberitaan dengan Judul Jokowi dan BPIP Digugat Buntut Paskibraka Putri Lepas Jilbab LeadDua lembaga menggugat Presiden Joko Widodo dan BPIP terkait polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab. Latar Informasi Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) sekitar pukul 11.00 WIB. Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan ini kaitannya dengan

polemik pasukan Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III. Kutipan Sumber Ketua LP3HI Arif Sahudi 1. "Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," 2. "Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," 3. "Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-gesa, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab, pakai hijab," Kepala BPIP Yudian Wahyudi 1. "Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Tahu ya uniform itu seragam, harus sama, sehingga ketika kita melihat ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,"

2. Struktur Sintaksi

What Orang tua Zahra Aisyah merasa kecewa dan sedih setelah melihat anaknya yang menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional tidak mengenakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo. Where Jakarta When 15 Agustus 2024 Who Ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto, WhyMen urut ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto, selama ini keluarga mengajarkan kepada anak-anak mereka pondasi agama Islam terkait kewajiban menggunakan jilbab bagi perempuan. Gatot pun kecewa dengan kebijakan Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait aturan lepas jilbab. How BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024,

sebagaimana tertuang dalam SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab. Menurut Yudi, penyeragaman pakaian itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman yang diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota paskibra yang sedang bersalama dengan Jokowi yang menjadikan foto ini sebagai penekanan bagi para pembaca

6. Analisis Artikel Berita 6

Judul : Kronologi Larangan Jilbab Paskibraka Berujung
Permintaan Maaf BPIP

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 16 Agustus 2024

Ringkasan : Larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto

pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial.

Table 4.6 Analisis Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Kronologi Larangan Jilbab Paskibraka Berujung Permintaan Maaf BPIP
	Lead	Larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial.
	Latar Informasi	Dalam foto-foto yang beredar, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan. Dugaan publik soal larangan pakai jilbab ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi. Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinannya. Mereka mengecam larangan itu. Mata publik pun tertuju pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kini membina Paskibraka.
	Kutipan Sumber	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi <ol style="list-style-type: none"> 1. "Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan

BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi,"

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono

1. "Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab,"
2. "Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024,"
3. "Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara,"

Pernyataan Opini

Penutup

Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini

Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara,"

Larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional

Skrip

What

		Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial.
	Where	Jakarta
	When	15 Agustus 2024
	Who	Organisasi masyarakat
	Why	Menurut Heru, jika sejak awal BPIP melaporkan aturan itu, maka Istana akan mengoreksinya. Dia pun menyatakan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap bisa memakai jilbab saat upacara pengibaran bendera di IKN pada 17 Agustus 2024.
	How	Pada Kamis (15/8), Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan lagi. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh. Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Heru Budi
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto anggota paskibra yang sedang melakukan Latihan tanpa menggunakan hijab

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pada Struktur Sintaksi berita dengan judul Judul Kronologi Larangan Jilbab Paskibraka Berujung Permintaan Maaf BPIP Lead Larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial. Latar Informasi Dalam foto-foto yang beredar, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Hal ini pun

menimbulkan pertanyaan. Dugaan publik soal larangan pakai jilbab ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi. Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinannya. Mereka mengecam larangan itu. Mata publik pun tertuju pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kini membina Paskibraka. Kutipan Sumber Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi 1. "Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi," Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono 1. "Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," 2. "Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024," 3. "Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari artikel adalah kutipan dari ketua BPIP "Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara,"

2. Struktur Skrip

What Larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial. Where Jakarta When 15 Agustus 2024 Who Organisasi masyarakat Why Menurut Heru, jika sejak awal BPIP melaporkan aturan itu, maka Istana akan mengoreksinya. Dia pun menyatakan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap bisa memakai jilbab saat upacara pengibaran bendera di IKN pada 17 Agustus 2024. How Pada Kamis (15/8), Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat

pernyataan lagi. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh. Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Heru Budi.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota paskibra yang sedang melakukan Latihan tanpa menggunakan hijab

7. Analisis Artikel Berita 7

Judul : Jelang Upacara di IKN, Belasan Paskibraka Putri Tampil Pakai Jilbab

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 17 Agustus 2024

Ringkasan : Belasan anggota Paskibraka putri dalam perayaan HUT ke-79 tampak memakai jilbab saat bersiap di Lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Table 4.7 Analisis Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Jelang Upacara di IKN, Belasan Paskibraka Putri Tampil Pakai Jilbab
	Lead	lasan anggota Paskibraka putri dalam perayaan HUT ke-79 tampak

		<p>memakai jilbab saat bersiap di Lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.</p>
<p>Latar Informasi</p>		<p>Sebelumnya, larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, yang tersebar di media sosial.</p>
<p>Kutipan Sumber</p>		<p>Tidak terdapat kutipan sumber pada artikel ini</p>
<p>Pernyataan Opini</p>		<p>Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini</p>
<p>Penutup</p>		<p>Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing- masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.</p>
<p>Skrip</p>	<p>What</p>	<p>Belasan anggota Paskibraka putri dalam</p>

perayaan HUT ke-79
tampak memakai jilbab
saat bersiap di Lapangan
Istana Negara, Ibu Kota
Nusantara (IKN),
Kalimantan Timur
Jakarta

Where

When

Who

17 Agustus 2024
Kepala Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
(BPIP) Yudian Wahyudi

Why

Ia mengklaim para
anggota Paskibraka
secara sukarela melepas
jilbab saat upacara
pengukuhan mengikuti
peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini
sudah disepakati dalam
surat pernyataan
kesediaan yang
bermeterai Rp10 ribu.

How

Yudian selaku Kepala
BPIP akhirnya membuat
pernyataan. Ia meminta
maaf kepada publik usai
larangan penggunaan
jilbab itu menimbulkan
kisruh. Yudian juga
secara tegas menyatakan
mencabut larangan
tersebut. Ia mengikuti

		arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto anggota paskibra yang sedang menggunakan hijab sebagai penekanan berita bagi pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Skrip

Pada struktur skrip pemberitaan ini dengan Judul **Jelang Upacara di IKN, Belasan Paskibraka Putri Tampil Pakai Jilbab** Lead **Lead** lasan anggota Paskibraka putri dalam perayaan HUT ke-79 tampak memakai jilbab saat bersiap di Lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Latar Informasi Sebelumnya, larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, yang tersebar di media sosial. Kutipan Sumber Tidak terdapat kutipan sumber pada artikel ini Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dengan demikian, Paskibraka putri bisa

memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

2. Struktur Skrip

What Belasan anggota Paskibraka putri dalam perayaan HUT ke-79 tampak memakai jilbab saat bersiap di Lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur Where Jakarta When 17 Agustus 2024 Who Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi Why Ia mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada. Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10 ribu. How Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh. Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota paskibra yang sedang menggunakan hijab sebagai penekanan berita bagi pembaca.

8. Analisis Artikel Berita 8

Judul : Jokowi Buka Suara soal Peluang Sanksi BPIP Buntut

Jilbab Paskibraka

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 17 Agustus 2024

Ringkasan : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan sejumlah pihak, termasuk dari DPR, yang memintanya memberikan sanksi hingga pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkannya pada Selasa (13/8) lalu.

Table 4.8 Analisis Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Jokowi Buka Suara soal Peluang Sanksi BPIP Buntut Jilbab Paskibraka
	Lead	Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan sejumlah pihak, termasuk dari DPR, yang memintanya memberikan sanksi hingga pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkannya pada Selasa (13/8) lalu
	Latar Informasi	Pada kesempatan itu, Jokowi pun menegaskan bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebinekaan di negara ini.

		<p>Dia mengatakan demikian karena Indonesia terdiri berbagai suku, ras, adat istiadat dan agama yang berbeda.</p>
	Kutipan Sumber	Presiden RI Joko Widodo
		<ol style="list-style-type: none"> 1. "Ya nanti dilihat," 2. "Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," 3.
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari
	Penutup	<p>penulis berita atau wartawan pada artikel ini</p> <p>Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.</p>
Skrip	What	<p>Belasan anggota Paskibraka putri dalam perayaan HUT ke-79 tampak memakai jilbab saat bersiap di Lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur</p>

Where	Jakarta
When	17 Agustus 2024
Who	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi
Why	Ia mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada. Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10 ribu.
How	Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh. Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing

Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto anggota paskibra yang sedang menggunakan hijab sebagai penekanan berita bagi pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Skrip

Judul **Jokowi Buka Suara soal Peluang Sanksi BPIP Buntut Jilbab Paskibraka**
 Lead **Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan sejumlah pihak, termasuk dari DPR, yang memintanya memberikan sanksi hingga pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkannya pada Selasa (13/8) lalu** Latar Informasi Pada kesempatan itu, Jokowi pun menegaskan bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebinekaan di negara ini. Dia mengatakan demikian karena Indonesia terdiri berbagai suku, ras, adat istiadat dan agama yang berbeda. Kutipan Sumber Presiden RI Joko Widodo 1. "Ya nanti dilihat," 2. "Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," 3. Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
 Penutup Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dengan demikian,

Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

2. Struktur Skrip

What Belasan anggota Paskibraka putri dalam perayaan HUT ke-79 tampak memakai jilbab saat bersiap di Lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur Where Jakarta When 17 Agustus 2024 Who Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi Why Ia mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada. Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10 ribu. How Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh. Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber.

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota paskibra yang sedang menggunakan hijab sebagai penekanan berita bagi pembaca

9. Analisis Artikel Berita 9

Judul : Respons Jokowi soal Peluang Sanksi BPIP buntut Jilbab Paskibraka
Sumber : Cnnindonesia.com
Tanggal : 18 Agustus 2024

Ringkasan : Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai sejumlah pihak meminta sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik jilbab Paskibraka putri.

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Respons Jokowi soal Peluang Sanksi BPIP buntut Jilbab Paskibraka
	Lead	Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai sejumlah pihak meminta sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik jilbab Paskibraka putri.
	Latar Informasi	Paskibraka tingkat nasional menjadi sorotan usai foto-foto pengukuhan mereka di IKN beredar luas di media sosial. Dalam foto-foto itu, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Sebelum dikukuhkan, beberapa di antara mereka disebut-sebut mengenakan jilbab bahkan dalam keseharian. Persoalan itu segera menjadi perbincangan publik dan menimbulkan pertanyaan soal dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka putri tingkat nasional.
	Kutipan Sumber	Presiden Indonesia Joko Widodo <ol style="list-style-type: none"> 1. "Ya, nanti dilihat," 2. "Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan bukan untuk perbedaan,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini

	Penutup	Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.
Skrip	What	Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai sejumlah pihak meminta sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik jilbab Paskibraka putri.
	Where	Jakarta
	When	18 Agustus 2024
	Who	Presiden Indonesia Joko Widodo
	Why	Dalam foto-foto itu, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Sebelum dikukuhkan, beberapa di antara mereka disebut-sebut mengenakan jilbab bahkan dalam keseharian.
	How	Persoalan itu segera menjadi perbincangan publik dan menimbulkan pertanyaan soal dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka putri tingkat nasional.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto anggota Presiden Jokowi sebagai penekanan

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul Respons Jokowi soal Peluang Sanksi BPIP buntut Jilbab Paskibraka Lead Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai sejumlah pihak meminta sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik jilbab Paskibraka putri. Latar Informasi Paskibraka tingkat nasional menjadi sorotan usai foto-foto pengukuhan mereka di IKN beredar luas di media sosial. Dalam foto-foto itu, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Sebelum dikukuhkan, beberapa di antara mereka disebut-sebut mengenakan jilbab bahkan dalam keseharian. Persoalan itu segera menjadi perbincangan publik dan menimbulkan pertanyaan soal dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka putri tingkat nasional. Kutipan Sumber Presiden Indonesia Joko Widodo 1. "Ya, nanti dilihat," 2. "Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan bukan untuk perbedaan," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

2. Struktur Skrip

What Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai sejumlah pihak meminta sanksi untuk Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buntut polemik jilbab Paskibraka putri. Where Jakarta When 18 Agustus 2024 Who Presiden Indonesia Joko Widodo Why Dalam foto-foto itu, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Sebelum dikukuhkan, beberapa di antara mereka disebut-sebut mengenakan jilbab bahkan dalam keseharian. How Persoalan itu segera menjadi perbincangan publik dan menimbulkan pertanyaan soal dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka putri tingkat nasional.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto anggota Presiden Jokowi sebagai penekanan

10. Analisis Artikel Berita 10

Judul : Menpora Mau Paskibraka Kembali ke Kemenpora Usai Polemik Jilbab BPIP

Sumber : Cnnindonesia.com

Tanggal : 18 Agustus 2024

Ringkasan : Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengusulkan supaya kewenangan pembinaan Paskibraka tingkat nasional bisa dikembalikan kembali ke Kemenpora usai polemik Paskibraka perempuan mencopot jilbab di momen pengukuhan beberapa waktu lalu.

Table 4.10 Analisis Berita 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Menpora Mau Paskibraka Kembali ke Kemenpora Usai Polemik Jilbab BPIP
	Lead	Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengusulkan supaya kewenangan pembinaan Paskibraka tingkat nasional bisa dikembalikan kembali ke Kemenpora usai polemik Paskibraka perempuan mencopot jilbab di momen pengukuhan beberapa waktu lalu.
	Latar Informasi	Dito bercerita sudah beberapa waktu ini mendiskusikan kepada Presiden Joko Widodo soal polemik Paskibraka. Ia menilai persoalan ini sudah terjadi bahkan sejak proses rekrutmen terjadi.
	Kutipan Sumber	Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo 1. "Dan memang ada kami memohon mungkin selanjutnya

	sebaiknya ini Paskibraka ini, ini bisa kembali Kemenpora,"
	2. "Karena apa? Ini adalah salah satu instrumen dan juga salah satu wadah dimana itu, dan generasi muda dan masalah dengan karakter building. Dan itu sebenarnya Tupoksi yang tepat untuk Kemenpora,"
	3. "Baru kemarin saja ada imbauan ataupun perintah dari yang berwenang untuk keseragaman itu yg sudah di preskon oleh BPIP,"
Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
Penutup	Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf kepada publik soal larangan penggunaan jilbab. Dia juga secara tegas menyatakan untuk mencabut larangan itu dan mengikuti arahan Kasetpres Heru Budi Hartono.
What	Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengusulkan supaya kewenangan pembinaan Paskibraka tingkat nasional bisa dikembalikan kembali ke Kemenpora usai polemik Paskibraka perempuan mencopot jilbab di momen pengukuhan beberapa waktu lalu.
Where	Jakarta
When	18 Agustus 2024
Who	Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo
Why	Dito bercerita sudah beberapa waktu ini mendiskusikan kepada Presiden Joko Widodo soal polemik Paskibraka. Ia menilai persoalan ini sudah terjadi bahkan sejak proses rekrutmen terjadi.

	How	Baginya, Kemenpora merupakan wadah yang tepat untuk membina Paskibraka lantaran menjadi wadah para generasi muda.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Menpora buka suara usai BPIP dikecam terkait larangan jilbab BPIP

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul Menpora Mau Paskibraka Kembali ke Kemenpora Usai Polemik Jilbab BPIP Lead Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengusulkan supaya kewenangan pembinaan Paskibraka tingkat nasional bisa dikembalikan kembali ke Kemenpora usai polemik Paskibraka perempuan mencopot jilbab di momen pengukuhan beberapa waktu lalu. Latar Informasi Dito bercerita sudah beberapa waktu ini mendiskusikan kepada Presiden Joko Widodo soal polemik Paskibraka. Ia menilai persoalan ini sudah terjadi bahkan sejak proses rekrutmen terjadi. Kutipan Sumber Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo 1. "Dan memang ada kami memohon mungkin selanjutnya sebaiknya ini Paskibraka ini, ini bisa kembali Kemenpora," 2. "Karena apa? Ini adalah salah satu instrumen dan juga salah satu wadah dimana itu, dan generasi muda dan masalah dengan karakter building. Dan itu sebenarnya Tupoksi yang tepat untuk Kemenpora," 3. "Baru kemarin saja ada imbauan ataupun perintah dari yang berwenang untuk keseragaman itu yg sudah di preskon oleh BPIP," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf kepada publik soal larangan penggunaan

jilbab. Dia juga secara tegas menyatakan untuk mencabut larangan itu dan mengikuti arahan Kasetpres Heru Budi Hartono.

2. Struktur Skrip

What Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengusulkan supaya kewenangan pembinaan Paskibraka tingkat nasional bisa dikembalikan kembali ke Kemenpora usai polemik Paskibraka perempuan mencopot jilbab di momen pengukuhan beberapa waktu lalu. Where Jakarta When 18 Agustus 2024 Who Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo Why Dito bercerita sudah beberapa waktu ini mendiskusikan kepada Presiden Joko Widodo soal polemik Paskibraka. Ia menilai persoalan ini sudah terjadi bahkan sejak proses rekrutmen terjadi. How Baginya, Kemenpora merupakan wadah yang tepat untuk membina Paskibraka lantaran menjadi wadah para generasi muda.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Menpora buka suara usai BPIP dikecam terkait larangan jilbab BPIP

4.2.2 Analisis Framing Berita Kompas.com

1. Analisis Artikel Berita 1

Judul : Masyarakat Diimbau Tenang Sikapi Polemik Jilbab Paskibraka
Sumber : Kompas.com
Tanggal : 15 Agustus 2024

Ringkasan : Masyarakat diimbau tidak tersulut atau bertindak gegabah menyikapi isu polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024.

Table 4.11 Analisis Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Masyarakat Diimbau Tenang Sikapi Polemik Jilbab Paskibraka
	Lead	Masyarakat diimbau tidak tersulut atau bertindak gegabah menyikapi isu polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024.
	Latar Informasi	Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
	Kutipan Sumber	Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution: <ol style="list-style-type: none"> 1. "Publik diimbau untuk tidak terprovokasi, tidak main hakim sendiri. Mari hadirkan keyakinan bahwa pihak berwenang menuntaskan kasus ini," 2. "Hak beragama itu adalah hak dasar warga negara (Pasal 22 UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Hak tersebut tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun,"
		Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi: <ol style="list-style-type: none"> 1. "BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia

		atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
	Penutup	Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.
Skrip	What	Masyarakat diimbau tidak tersulut atau bertindak gegabah menyikapi isu polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibar Benda Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024.
	Where	Jakarta
	When	18 Agustus 2024
	Who	Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution
	Why	Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.
	How	Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Presiden Jokowi mengukuhkan 76 pelajar menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN),

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pada struktur sintasi berita dengan Judul Masyarakat Diimbau Tenang Sikapi Polemik Jilbab Paskibraka Lead Masyarakat diimbau tidak tersulut atau bertindak gegabah menyikapi isu polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Latar Informasi Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kutipan Sumber Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution: 1. "Publik diimbau untuk tidak terprovokasi, tidak main hakim sendiri. Mari hadirkan keyakinan bahwa pihak berwenang menuntaskan kasus ini," 2. "Hak beragama itu adalah hak dasar warga negara (Pasal 22 UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Hak tersebut tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun," Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi: 1. "BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Dalam

kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

2. Struktur Skrip

What Masyarakat diimbau tidak tersulut atau bertindak gegabah menyikapi isu polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Where Jakarta When 18 Agustus 2024 Who Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution Why Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa How Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber.

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Presiden Jokowi mengukuhkan 76 pelajar menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN),

2. Analisis Artikel Berita 2

Judul : Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPIP

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 16 Agustus 2024

Ringkasan : Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Table 4.12 Analisis Berita 12

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPIP
	Lead	Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
	Latar Informasi	Permintaan itu buntut polemik pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai acara groundbreaking gedung kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang
	Kutipan Sumber	Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir: <ol style="list-style-type: none"> 1. “BPIP justru jangan memelopori sekularisasi di Indonesia,” 2. “Kalau menimbulkan kegaduhan, bahkan bertentangan dengan Pancasila, ya, pimpinan di atasnya kami harapkan melakukan tindakan,” <p>Kepala BPIP Yudian Wahyudi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang

	berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut,"
	2. "Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada,"
Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
Penutup	Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.
What	Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Where	Jakarta
When	16 Agustus 2024
Who	Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
Why	Semula, Haedar menyatakan, BPIP seharusnya menjadi teladan, terutama yang tercermin dari sila 1 dan 2 Pancasila, terkait toleransi menjalankan praktik beragama.

	How	Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Pada berita dengan Judul Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPIP Lead Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Latar Informasi Permintaan itu buntut polemik pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai acara groundbreaking gedung kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang Kutipan Sumber Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir: 1. "BPIP justru jangan memelopori sekularisasi di Indonesia," 2. "Kalau menimbulkan kegaduhan, bahkan bertentangan dengan Pancasila, ya, pimpinan di atasnya kami harapkan melakukan tindakan," Kepala BPIP Yudian Wahyudi: 1. "BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," 2. "Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan

opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup dari artikel ini terdapat kalimat Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

2. Struktur Skrip

What Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Where Jakarta When 16 Agustus 2024 Who Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Why Semula, Haedar menyatakan, BPIP seharusnya menjadi teladan, terutama yang tercermin dari sila 1 dan 2 Pancasila, terkait toleransi menjalankan praktik beragama. How Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir

3. Analisis Artikel Berita 3

Judul : Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 16 Agustus 2024

Ringkasan : Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas mengatakan bahwa hendaknya semua memahami bahwa pemakaian jilbab merupakan hak semua orang.

Table 4.13 Analisis Berita 13

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati
	Lead	Artikel dimulai dengan mengutip pernyataan Menteri Agama (Menag) tentang hak memakai hijab, terkait polemik Paskibraka yang diminta melepas jilbab dalam acara kemerdekaan.
	Latar Informasi	Polemik terjadi setelah seorang anggota Paskibraka diminta untuk melepas jilbab. Menteri Agama menegaskan bahwa jilbab adalah hak individu dan seharusnya dihormati oleh semua pihak.
	Kutipan Sumber	Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas: <ol style="list-style-type: none"> 1. "Jadi begini, hijab itu hak. orang pakai jilbab nih mbak, ini hak," 2. "Namanya hak ya kita harus, hormati itu saja. ya. Kita hormati hak orang,"
		Kepala BPIP Yudian Wahyudi <ol style="list-style-type: none"> 1. "BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," 2. "Penampilan Paskibraka putri dengan

		mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
	Penutup	Artikel diakhiri dengan penegasan Menag yang berharap kebijakan terkait Paskibraka ini dapat dievaluasi kembali agar tidak melanggar kebebasan beragama. Polemik tentang permintaan kepada anggota Paskibraka untuk melepas jilbab dalam upacara kemerdekaan.
Skrip	What	Jakarta
	Where	16 Agustus 2024
	When	Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas
	Who	Menag menegaskan bahwa jilbab adalah hak individu yang harus dihormati dan tidak seharusnya menjadi syarat untuk mengikuti kegiatan negara.
	Why	Menag menyarankan agar kebijakan tersebut dievaluasi untuk memastikan bahwa hak kebebasan beragama dihormati dalam pelaksanaan tugas negara.
	How	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen Senayan (IKN) agar menjadi gambaran untuk pembaca
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Artikel ini disusun dengan fokus utama pada pernyataan Menag yang mendukung kebebasan beragama dan hak individu untuk mengenakan hijab. Artikel langsung menyajikan pandangan Menag sebagai bagian utama dari narasi, memberikan kesan kuat bahwa kebijakan yang menuntut pelepasan jilbab perlu dipertimbangkan kembali. Penyusunan kalimat pertama secara langsung menggambarkan ketegangan antara kebijakan negara (Paskibraka) dan hak individu (kebebasan beragama). Ini membuka ruang bagi pembaca untuk melihat masalah ini sebagai isu hak asasi manusia.

2. Struktur Skrip

Paskibraka vs. Hak Individu: Skrip yang muncul adalah dilema antara memenuhi kewajiban negara (sebagai anggota Paskibraka) dan menjaga identitas agama (menggunakan jilbab). Otoritas vs. Kebebasan Beragama: Narasi mengungkapkan ketegangan antara kebijakan negara yang mengatur kegiatan Paskibraka dengan hak individu untuk menjalankan kewajiban agama, yang ditangani dengan perspektif dari Menag sebagai otoritas agama. Evaluasi Kebijakan: Skrip ini juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan yang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.

3. Struktur Tematik

Pathos: Artikel ini menggugah emosi pembaca dengan menekankan bahwa kebebasan beragama, termasuk mengenakan jilbab, adalah hak asasi yang harus dihormati. Ini membangun simpati terhadap Paskibraka yang mungkin merasa terpaksa melepas jilbab mereka. Logos: Menag menggunakan argumen logis bahwa kebijakan yang memaksa seseorang melepas jilbab bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Etos: Menag memberikan kredibilitas pada argumen ini dengan posisi otoritatifnya sebagai pejabat negara yang berkompoten dalam masalah kebebasan beragama. Dengan pernyataan ini, ia

mencoba meringkaskan masalah ini dalam kerangka moral dan hukum yang lebih luas.

4. Struktur Retoris

Terdapat foto Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen Senayan (IKN) agar menjadi gambaran untuk pembaca.

4. Analisis Artikel Berita 4

- Judul** : Soal Paskibraka Diminta Lepas Jilbab, Pengamat: Tidak Seharusnya Terjadi
- Sumber** : Kompas.com
- Tanggal** : 16 Agustus 2024
- Ringkasan** : Belakangan ini ramai diperbincangkan belasan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang melepas jilbabnya saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Table 4.13 Analisis Berita 13

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPIP
	Lead	Artikel dimulai dengan mengangkat isu kontroversial terkait permintaan pihak penyelenggara Paskibraka untuk seorang anggota Paskibraka melepas jilbab.
	Latar Informasi	Paskibraka, sebagai kelompok yang terlibat dalam upacara kemerdekaan, diminta untuk melepas jilbab dalam rangka mengikuti upacara. Situasi ini menimbulkan kontroversi terkait kebebasan beragama dan kewajiban negara. Pengamat memberikan pendapat bahwa

		kebijakan ini tidak seharusnya terjadi.
	Kutipan Sumber	pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. "Menurut saya larangan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Apalagi dengan alasan biar seragam," 2. "Justru kalau mau keragaman betul ya enggak perlu pakai seragam. Biar saja atau arahkan pakai baju daerah masing-masing," 3. "Padahal Islam merupakan salah satu agama yang diakui secara formal,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
	Penutup	Berita ditutup dengan penegasan bahwa kebijakan ini harus diperhatikan secara serius agar tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut, dan agar tidak melanggar hak asasi individu.
Skrip	What	Permintaan agar Paskibraka melepas jilbab dalam upacara kemerdekaan.
	Where	Jakarta
	When	16 Agustus 2024
	Who	pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan
	Why	Permintaan tersebut dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia oleh sebagian pihak.
	How	Pihak penyelenggara meminta Paskibraka untuk mengikuti peraturan yang ada, sementara pengamat memberikan kritik atas kebijakan tersebut.
	Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat

		terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Ketua Presiden Joko Widodo saat mengukuhkan 76 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN)

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Artikel ini disusun dengan menekankan konflik antara kebebasan beragama dan kewajiban dalam tugas negara. Pembaca disuguhkan dengan fakta pertama yang mengungkapkan permintaan melepas jilbab, yang langsung menciptakan ketegangan. Penggunaan kalimat-kalimat yang menggugah emosi seperti "tidak seharusnya terjadi" memperkuat narasi ketidakadilan dan penindasan kebebasan beragama.

2. Struktur Skrip

Skrip yang hadir adalah ketegangan antara hak individu (dalam hal ini kebebasan beragama dengan jilbab) dan kewajiban negara (tugas sebagai anggota Paskibraka). Skrip ini menggambarkan bahwa individu harus memilih antara menjaga identitas keagamaan atau mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara. Narasi berfokus pada kritik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini Paskibraka.

3. Struktur Tematik

Pathos: Penggunaan kata-kata yang membangkitkan emosi seperti "tidak seharusnya terjadi" dan "hak asasi manusia" mempengaruhi pembaca untuk merasa bahwa kebijakan ini tidak adil. Logos: Logika yang digunakan adalah bahwa kebijakan ini bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh

konstitusi. Etos: Opini yang disampaikan oleh pengamat memberikan kredibilitas pada argumen tersebut. Opini ini memberikan otoritas dan pemahaman mengenai pentingnya hak asasi manusia.

4. Struktur Retoris

Terdapat foto Presiden Joko Widodo saat mengukuhkan 76 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berguna sebagai penekanan bagi pembaca.

5. Analisis Artikel Berita 5

Judul : Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab Paskibraka

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 16 Agustus 2024

Ringkasan : Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan agar DPR memanggil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait kasus lepas hijab anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional putri tahun 2024.

Table 4.15 Analisis Berita 15

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab Paskibraka
	Lead	Politikus PKS menyarankan agar Komisi II DPR memanggil BPIP untuk meminta klarifikasi terkait kasus pelepasan hijab yang dianggap melanggar kebebasan beragama.
	Latar Informasi	Peristiwa ini terkait kasus seorang mahasiswi yang diminta melepas hijab oleh pihak BPIP saat mengikuti program pendidikan kebangsaan. PKS menilai tindakan tersebut mencederai

		nilai-nilai kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.
	Kutipan Sumber	Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera
		<ol style="list-style-type: none"> 1. "Saya akan usulkan agar DPR memanggil BPIP. Perlu ada pelajaran," 2. "Komisi II DPR berharap aturan BPIP soal seragam Paskibra itu dapat direvisi sehingga persoalan seperti ini tidak terulang di kemudian hari," 3. "Dalam Pancasila, setiap individu berhak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Aturan yang dibuat BPIP jadi seperti ada 'pemaksaan' secara harus,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
	Penutup	Berita ditutup dengan Usulan pemanggilan BPIP bertujuan untuk memastikan agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan, dan untuk menegaskan komitmen pemerintah pada kebebasan beragama.
Skrip	What	Kasus pelepasan hijab oleh mahasiswi yang dipandang bertentangan dengan kebebasan beragama.
	Where	Jakarta
	When	16 Agustus 2024
	Who	BPIP dan mahasiswi peserta program pendidikan kebangsaan, serta Politikus PKS.
	Why	Tindakan pelepasan hijab dianggap mencederai hak konstitusional warga negara.
	How	Politikus PKS mengusulkan Komisi II DPR untuk memanggil

Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	BPIP guna meminta klarifikasi dan evaluasi. Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Kata-kata seperti "pelanggaran kebebasan beragama," "hak konstitusional," dan "nilai-nilai Pancasila" digunakan untuk membangun kesan serius terhadap kasus ini.

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Struktur berita disusun untuk menyoroti kasus pelepasan hijab yang melibatkan BPIP sebagai pihak utama. Judul berita, "Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab," langsung memberikan fokus pada usulan PKS yang meminta pemanggilan BPIP oleh DPR. Paragraf pembuka (lead) menyebutkan bahwa PKS mengusulkan pemanggilan BPIP ke Komisi II DPR untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kebebasan beragama terhadap seorang mahasiswi.

2. Struktur Skrip

Kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan pelepasan hijab yang terjadi dalam program pendidikan kebangsaan yang diselenggarakan oleh BPIP. Insiden ini melibatkan seorang mahasiswi sebagai peserta program, yang diminta untuk melepas hijabnya. Kejadian tersebut mendapatkan perhatian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), khususnya dari salah satu politikus yang menilai tindakan tersebut melanggar kebebasan beragama, sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Waktu kejadian spesifik tidak dijelaskan dalam berita, tetapi insiden ini

terjadi dalam konteks pelaksanaan kegiatan pendidikan kebangsaan. Lokasi program juga tidak diuraikan secara rinci dalam pemberitaan.

3. Struktur Tematik

Berita ini memiliki fokus utama pada kritik terhadap BPIP yang diduga melanggar hak konstitusional. Isu kebebasan beragama ditempatkan sebagai inti masalah. Narasi berita dimulai dengan usulan PKS, diikuti penjelasan tentang latar belakang insiden, kemudian diakhiri dengan solusi berupa pemanggilan BPIP untuk evaluasi. Struktur narasi dirancang logis, dengan argumen yang mengarahkan pembaca pada pentingnya melindungi hak beragama sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila

4. Struktur Retoris

Bahasa dalam berita ini dipilih untuk menegaskan pentingnya isu kebebasan beragama. Kata-kata seperti "kebebasan beragama," "hak konstitusional," dan "nilai-nilai Pancasila" digunakan untuk menekankan keseriusan kasus ini. Meski tidak ada simbol visual dalam berita, narasi menggambarkan BPIP sebagai lembaga yang gagal menjadi teladan dalam menghormati hak individu.

6. Analisis Artikel Berita 6

Judul : Pj Gubernur Sulsel Pastikan Paskibraka Tetap Berhijab

Saat Upacara HUT Ke-79 RI

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 16 Agustus 2024

Ringkasan : Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh memastikan bahwa anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di daerahnya dapat tetap mengenakan hijab.

Table 4.16 Analisis Berita 17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
-------------------	-----------------	------------------

Sintaksi	Judul	Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab Paskibraka
	Lead	Gubernur memastikan bahwa anggota Paskibraka di Sulsel, khususnya yang berhijab, diperbolehkan mengenakan hijab saat bertugas dalam upacara kenegaraan.
	Latar Informasi	Insiden ini muncul setelah aturan di tingkat nasional yang meminta Paskibraka putri berhijab melepas hijab selama upacara pengukuhan di IKN. Namun, di Sulsel, kebijakan ini tidak diterapkan. Latihan Paskibraka dilakukan di Rujab Gubernur.
	Kutipan Sumber	Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh
	Pernyataan Opini	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Saya yang melihat langsung latihan Paskibraka di Rumah Jabatan setiap hari. Tidak ada masalah dengan penggunaan hijab. Jadi, silakan untuk tetap berhijab, saya yang bertanggung jawab," 2. "Kami berpedoman pada aturan yang ada, dan tidak ada instruksi khusus dari atas yang melarang jilbab. Jadi, yang ingin memakai jilbab, silakan," 3. "Saya sudah siap bertugas dengan hijab," <p>Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini</p>
	Penutup	Berita diakhiri dengan perbandingan kebijakan Sulsel yang berbeda dengan kebijakan nasional, menyoroti dukungan daerah terhadap keberagaman.

Skrip	What	Anggota Paskibraka di Sulsel tetap diperbolehkan mengenakan hijab selama upacara HUT ke-79 RI.
	Where	Jakarta
	When	16 Agustus 2024
	Who	Pj Gubernur Sulsel (Prof. Zudan Arif Fakrulloh)
	Why	Kebijakan lokal yang berbeda dengan kebijakan nasional mendukung keberagaman dan kebebasan beragama.
Tematik	How	Pj Gubernur Sulsel memberikan jaminan kepada anggota Paskibraka yang berhijab dan memastikan pelatih tidak melarang penggunaan hijab.
	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Berita memfokuskan pada dukungan pemerintah daerah terhadap kebebasan beragama melalui kebijakan yang membolehkan penggunaan hijab oleh Paskibraka.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Kata seperti "bebas," "tidak ada gangguan," dan "saya yang tanggung jawab" menekankan dukungan terhadap kebebasan individu.

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Struktur berita diawali dengan judul yang menegaskan sikap Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam mendukung penggunaan hijab oleh anggota Paskibraka selama upacara kenegaraan. Judul ini menekankan aspek kebebasan beragama yang dijunjung di Sulsel. Pada bagian lead, berita langsung memaparkan keputusan Gubernur yang memastikan Paskibraka berhijab tetap dapat menjalankan tugas tanpa melepas atribut keagamaan mereka. Ini menjadi inti utama berita, mengangkat isu kebebasan individu. Latar informasi dijelaskan dengan

menyebutkan pelaksanaan latihan Paskibraka di Rumah Jabatan Gubernur, tempat para anggota, termasuk yang berhijab, tetap merasa nyaman. Tidak ada aturan atau larangan lokal yang membatasi penggunaan hijab. Pada bagian penutup, berita membandingkan kebijakan di Sulsel dengan kebijakan di tingkat nasional, di mana anggota Paskibraka putri berhijab diminta melepas hijab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penutup ini memperkuat perbedaan pendekatan antara pemerintah daerah dan nasional.

2. Struktur Skrip

Berita ini mengangkat keputusan Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang memperbolehkan anggota Paskibraka berhijab untuk tetap mengenakan hijab selama upacara HUT ke-79 RI. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip kebebasan beragama dan tidak adanya aturan lokal yang melarang penggunaan hijab dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Peristiwa ini terjadi menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 17 Agustus 2024, dan berkaitan dengan latihan Paskibraka yang dilakukan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

3. Struktur Tematik

Dari segi tematik, fokus utama berita adalah dukungan terhadap kebebasan beragama dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Narasi berita disusun secara runtut, dimulai dengan keputusan Gubernur, dilanjutkan dengan pernyataan pelatih dan anggota Paskibraka, serta diakhiri dengan perbandingan kebijakan nasional dan lokal. Alur berita menyoroti bagaimana kebijakan di Sulsel dianggap lebih menghargai keberagaman dibandingkan kebijakan nasional. Penggunaan hijab diposisikan sebagai simbol kebebasan beragama yang penting, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas anggota Paskibraka.

4. Struktur Retoris

Dari sisi retoris, berita menggunakan pilihan kata yang kuat untuk mendukung kebijakan daerah. Misalnya, ungkapan "silakan tetap berhijab" dan "saya yang tanggung jawab" menonjolkan keberpihakan Gubernur pada kebebasan individu. Simbol hijab digunakan sebagai bentuk keberagaman yang dipertahankan di Sulsel,

sementara perbandingan dengan kebijakan nasional mempertegas perbedaan pendekatan yang ada.

7. Analisis Artikel Berita 7

Judul : Menegal BPIP yang Viral Setelah Buat Aturan Larang Paskibraka Pakai Jilbab

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 16 Agustus 2024

Ringkasan : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 belakangan ini menarik perhatian masyarakat karena ada belasan anggotanya yang membuka jilbab saat pengukuhan.

Table 4.17 Analisis Berita 17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Mengenal BPIP yang Viral Setelah Buat Aturan Larang Paskibraka Pakai Jilbab
	Lead	BPIP menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan aturan yang melarang anggota Paskibraka berhijab dalam upacara kenegaraan. Kontroversi ini memicu kritik luas dari berbagai pihak.
	Latar Informasi	Latar belakang berita menjelaskan peran BPIP sebagai lembaga yang mengatur pembinaan ideologi Pancasila. Aturan terkait hijab memunculkan kritik karena dianggap tidak mencerminkan kebebasan beragama.
	Kutipan Sumber	Tidak terdapat kutipan sumber
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini

	Penutup	Berita diakhiri dengan pernyataan bahwa aturan ini sedang dalam pembahasan ulang setelah menuai protes luas dari masyarakat dan organisasi keagamaan.
Skrip	What	BPIP menjadi viral karena membuat aturan yang melarang anggota Paskibraka mengenakan hijab dalam upacara kenegaraan.
	Where	Jakarta
	When	16 Agustus 2024
	Who	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
	Why	Aturan ini dibuat dengan alasan untuk menjaga keseragaman dalam protokol upacara kenegaraan. Namun, banyak yang menilai aturan ini tidak menghormati keberagaman dan hak beragama.
	How	Publik bereaksi keras melalui media sosial, tokoh masyarakat menyampaikan kritik, dan organisasi keagamaan mendesak pemerintah mengevaluasi aturan tersebut.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Berita memfokuskan pada kontroversi aturan BPIP yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Kata seperti "viral," "kritik luas," dan "melanggar hak" memperkuat narasi kritik terhadap BPIP. Sementara itu, frasa seperti "keseragaman protokol" digunakan BPIP untuk membenarkan aturan tersebut.

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Berikut adalah analisis berita "Mengenal BPIP yang Viral Setelah Buat Aturan Larang Paskibraka Pakai Jilbab" menggunakan perangkat framing Zongdang Pan dan Kosicki yang dirinci dalam paragraf: 1. Perangkat Framing Sintaksis Struktur sintaksis berita dimulai dengan judul yang menarik perhatian: "Mengenal BPIP yang Viral Setelah Buat Aturan Larang Paskibraka Pakai Jilbab". Judul ini memusatkan perhatian pada BPIP yang menjadi perbincangan publik karena kebijakan kontroversial terkait larangan penggunaan hijab oleh anggota Paskibraka. Pada bagian lead, berita langsung menjelaskan bahwa aturan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Latar informasi memberikan konteks mengenai peran BPIP sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Disebutkan bahwa aturan tersebut dibuat untuk menjaga keseragaman protokol dalam upacara kenegaraan. Namun, masyarakat dan tokoh agama mengkritik kebijakan ini karena dianggap melanggar hak konstitusional terkait kebebasan beragama. Penutup berita menyebutkan bahwa kontroversi ini memaksa BPIP untuk mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut, karena reaksi keras dari publik, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.

2. Struktur Skrip

Aturan yang dibuat oleh BPIP, melarang anggota Paskibraka mengenakan hijab saat upacara kenegaraan, memicu kontroversi besar di masyarakat. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena dianggap bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi BPIP sebagai pembuat aturan, anggota Paskibraka yang terkena dampak langsung, serta masyarakat, tokoh agama, dan organisasi keagamaan yang memberikan kritik keras. Kasus ini mencuat pada bulan Agustus 2024, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, ketika aturan tersebut diberlakukan secara nasional. Meskipun aturan berlaku di seluruh Indonesia, sorotan publik lebih besar di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim yang menilai kebijakan ini

tidak menghormati keberagaman. BPIP berdalih bahwa aturan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman protokol dalam upacara formal. Namun, alasan tersebut dianggap tidak cukup untuk membenarkan pelanggaran hak individu. Reaksi publik terhadap kebijakan ini berlangsung secara masif, dengan kritik yang disampaikan melalui media sosial, pernyataan tokoh masyarakat, serta desakan organisasi keagamaan untuk mencabut aturan tersebut.

3. Struktur Tematik

Berita ini menekankan narasi tentang pelanggaran hak kebebasan beragama oleh kebijakan BPIP. Fokusnya adalah pada bagaimana aturan tersebut tidak sejalan dengan nilai keberagaman dan toleransi yang menjadi fondasi Pancasila. Alur informasi dimulai dengan pengenalan aturan kontroversial, dilanjutkan dengan kritik dari berbagai pihak, pembelaan dari BPIP, dan diakhiri dengan informasi mengenai kemungkinan revisi aturan. Struktur ini menunjukkan konflik antara kebijakan institusi negara dan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas.

4. Struktur Retoris

Dari segi retorik, berita menggunakan pilihan kata yang memperkuat kritik terhadap BPIP. Kata-kata seperti "viral," "melanggar hak," dan "menuai protes" menonjolkan reaksi negatif terhadap kebijakan tersebut. Simbol hijab digunakan sebagai representasi keberagaman budaya dan hak kebebasan beragama di Indonesia. Frasa yang digunakan BPIP, seperti "keseragaman protokol," berfungsi untuk memperhalus alasan di balik aturan, tetapi kurang efektif dalam meredam kritik publik.

8. Analisis Artikel Berita 8

Judul : Soal Paskibraka Sempat Lepas Jilbab, Jokowi: Hormati Keberagaman

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 17 Agustus 2024

Ringkasan : Presiden Joko Widodo angkat bicara soal aturan tidak tertulis yang membuat 18 anggota Paskibraka melepas jilbab saat dikukuhkan oleh Presiden.

Table 4.18 Analisis Berita 18

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Soal Paskibraka Sempat Lepas Jilbab, Jokowi: Hormati Keberagaman
	Lead	Lead kemungkinan langsung mengarah pada sikap Jokowi yang menghormati keberagaman, serta respons terhadap kontroversi hijab Paskibraka.
	Latar Informasi	Berita ini akan memberikan latar belakang mengenai peran Paskibraka, aturan protokol upacara, dan sejarah kebijakan terkait hijab dalam konteks Indonesia yang pluralistik.
	Kutipan Sumber	Presiden Joko Widodo: <ol style="list-style-type: none"> "Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebhinnekaan. Karena negara-negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda," "Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko <ol style="list-style-type: none"> "Kalau dari Pak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat

		<p>pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini</p> <p>Penutup</p> <p>Berita kemungkinan ditutup dengan pernyataan Jokowi yang menegaskan komitmennya pada pluralisme, serta harapan agar situasi ini dapat diselesaikan dengan bijaksana</p>
Skrip	<p>What</p> <p>Where</p> <p>When</p> <p>Who</p> <p>Why</p> <p>How</p>	<p>Kontroversi terkait Paskibraka yang sempat diminta untuk melepas jilbab saat upacara kenegaraan dan respons Jokowi yang menghormati keberagaman.</p> <p>Jakarta</p> <p>17 Agustus 2024</p> <p>Presiden Jokowi, Paskibraka, BPIP, organisasi keagamaan, dan masyarakat umum.</p> <p>Masalah timbul karena perbedaan persepsi mengenai keseragaman protokol upacara dan hak kebebasan beragama, serta peran negara dalam menjaga kebijakan ini.</p> <p>Reaksi terhadap kebijakan ini muncul melalui media sosial, protes publik, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk Jokowi yang menghormati keberagaman.</p>
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Berita ini menekankan narasi tentang bagaimana kebijakan BPIP dan sikap Jokowi seharusnya mencerminkan nilai-nilai keberagaman dan kebebasan beragama di Indonesia.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Frasa seperti "hormati keberagaman" digunakan untuk menekankan posisi Jokowi yang mendukung toleransi. Sementara itu, frasa "kontroversi" dan "protokol kenegaraan" menciptakan ketegangan dalam

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Judul berita mengarah pada dua aspek utama: kontroversi terkait Paskibraka yang diminta melepas jilbab, dan sikap Presiden Jokowi yang menghormati keberagaman. Ini menonjolkan ketegangan antara keseragaman upacara dan kebebasan beragama. Lead berita memulai dengan menyebutkan pernyataan Jokowi yang mengutamakan keberagaman, mencerminkan respons yang berimbang terhadap isu tersebut. Latar informasi memberi konteks mengenai Paskibraka dan kebijakan protokol kenegaraan yang menuntut keseragaman, yang kemudian dipertanyakan karena dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama. Jokowi kemungkinan menggarisbawahi komitmennya terhadap kebebasan beragama, sementara tokoh agama dan masyarakat mungkin mengkritik kebijakan tersebut. Pernyataan opini dalam berita ini menyoroti bagaimana sikap Jokowi yang menghormati keberagaman berhadapan dengan ketegangan sosial yang muncul dari kebijakan BPIP. Penutupan berita kemungkinan memperlihatkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut, seiring dengan respons publik yang berkembang.

2. Struktur Skrip

Dalam berita ini, elemen 5W+1H berperan penting untuk mengungkapkan konteks lengkap masalah. Apa yang terjadi? Berita ini mengungkapkan peristiwa kontroversial terkait Paskibraka yang diminta melepas jilbab, yang kemudian mendapat respons dari Jokowi yang menegaskan pentingnya menghormati keberagaman. Siapa yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat meliputi Presiden Jokowi, anggota Paskibraka, BPIP, serta masyarakat dan tokoh agama yang memberikan pendapat dan kritik. Kapan peristiwa ini terjadi? Isu ini muncul menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia 2024. Di mana hal ini terjadi?

Isu ini muncul dalam konteks upacara kenegaraan yang berlangsung di Indonesia, namun dengan sorotan khusus di daerah mayoritas Muslim. Mengapa hal ini terjadi? Ketegangan ini terjadi karena perbedaan pandangan tentang apakah keseragaman dalam upacara kenegaraan lebih penting daripada kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Bagaimana hal ini berkembang? Kontroversi ini berkembang melalui media sosial dan pernyataan dari berbagai pihak yang akhirnya mendorong Presiden Jokowi untuk menyampaikan sikapnya.

3. Struktur Tematik

Dalam segi tematik, berita ini menggambarkan konflik antara upaya pemerintah menjaga keseragaman protokol kenegaraan dengan hak kebebasan beragama. Tema utama yang muncul adalah pentingnya pluralisme dan keberagaman di Indonesia, yang tercermin dalam respons Jokowi terhadap situasi tersebut. Berita ini juga menekankan bagaimana pemerintah menghadapi kritik dari masyarakat terkait isu kebebasan beragama dan bagaimana perbedaan tersebut bisa diselesaikan dalam kerangka negara yang menghormati kebhinekaan.

4. Struktur Retoris

Dari segi retorik, pilihan kata dalam berita ini digunakan untuk menonjolkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Misalnya, frasa "hormati keberagaman" digunakan untuk menggambarkan sikap Jokowi yang mendukung kebebasan beragama, sementara kata-kata seperti "kontroversi" dan "protokol" menekankan adanya ketegangan antara dua nilai ini. Simbol jilbab dalam berita ini menjadi representasi dari identitas agama dan keberagaman budaya, yang disandingkan dengan simbol kesatuan nasional yang digambarkan melalui keseragaman protokol.

9. Analisis Artikel Berita 9

Judul : Pemerintah Pastikan Anggota Paskibraka 2024 Tetap Boleh Pakai Jilbab
Sumber : Kompas.com
Tanggal : 17 Agustus 2024

Ringkasan :Anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang berjilbab dipastikan akan tetap menggunakan jilbabnya saat pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

Table 4.19 Analisis Berita 19

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Pemerintah Pastikan Anggota Paskibraka 2024 Tetap Boleh Pakai Jilbab
	Lead	Anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang berjilbab dipastikan akan tetap menggunakan jilbabnya saat pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.
	Latar Informasi	Heru menegaskan, para anggota Paskibraka putri sudah seharusnya tetap menggunakan jilbab saat menjalani proses berkaitan dengan ke-Paskibraan sesuai saat awal mula mendaftar.
	Kutipan Sumber	<p>Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan jilbab," 2. "Kalau saya tidak dilaporkan. Tidak tau prosesnya dari kabupaten, kota, provinsi, tingkat pusat, atau tingkat nasional. Langsung ke pelatihan di Cibubur. Begitu masuk ke Istana, ke IKN saya tidak pernah ketemu adik-adik itu (Paskibraka)," 3. "Artinya adik-adik putri harus sebagai mana mereka pada saat mendaftar

		menggunakan jilbab ya tetap menggunakan (Jilbab),"
	Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini
	Penutup	Berita ditutup dengan Adapun awalnya Paskibraka setiap tahun dibawahhi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun kini, Paskibraka berada dalam naungan BPIP.
Skrip	What	Anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang berjilbab dipastikan akan tetap menggunakan jilbabnya saat pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur..
	Where	Jakarta
	When	17 Agustus 2024
	Who	Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono..
	Why	Heru mengaku tidak tahu menahu bahwa para anggota putri Paskibraka diatur untuk tidak menggunakan jilbab saat pengukuhan dan upacara nasional. Menurut, Heru aturan itu tidak dikoordinasikan dengan pihak Istana sebagai penyelenggara acara.
	How	Heru menegaskan, para anggota Paskibraka putri sudah seharusnya tetap menggunakan jilbab saat menjalani proses berkaitan dengan ke-Paskibraan sesuai saat awal mula mendaftar.
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	

		terdapat tanggapan dari beberapa narasumber
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto paskibraka yang sedang berbaris untuk menjadi pekatan bagi pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian,2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Berita dengan judul Judul Pemerintah Pastikan Anggota Paskibraka 2024 Tetap Boleh Pakai Jilbab Lead Anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang berjilbab dipastikan akan tetap menggunakan jilbabnya saat pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Latar Informasi Heru menegaskan, para anggota Paskibraka putri sudah seharusnya tetap menggunakan jilbab saat menjalani proses berkaitan dengan ke-Paskibraan sesuai saat awal mula mendaftar. Kutipan Sumber Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono: 1. "Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan jilbab," 2. "Kalau saya tidak dilaporkan. Tidak tau prosesnya dari kabupaten, kota, provinsi, tingkat pusat, atau tingkat nasional. Langsung ke pelatihan di Cibubur. Begitu masuk ke Istana, ke IKN saya tidak pernah ketemu adik-adik itu (Paskibraka)," 3. "Artinya adik-adik putri harus sebagai mana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya tetap menggunakan (Jilbab)," Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup Berita ditutup dengan Adapun awalnya Paskibraka setiap tahun dibawah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun kini, Paskibraka berada dalam naungan BPIP.

2. Struktur Skrip

What Anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang berjilbab dipastikan akan tetap menggunakan jilbabnya saat pelaksanaan

upacara kenegaraan 2024 di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.. Where Jakarta When 17 Agustus 2024 Who Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.. Why Heru mengaku tidak tahu menahu bahwa para anggota putri Paskibraka diatur untuk tidak menggunakan jilbab saat pengukuhan dan upacara nasional. Menurut, Heru aturan itu tidak dikoordinasikan dengan pihak Istana sebagai penyelenggara acara. How Heru menegaskan, para anggota Paskibraka putri sudah seharusnya tetap menggunakan jilbab saat menjalani proses berkaitan dengan ke-Paskibraan sesuai saat awal mula mendaftar.

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto paskibraka yang sedang berbaris untuk menjadi pekatan bagi pembaca

10. Analisis Artikel Berita 10

Judul : Menteri Dito Minta Pengelolaan Paskibraka Bisa Dikembalikan ke Kemenpora

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 18 Agustus 2024

Ringkasan : Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Table 4.20 Analisis Berita 20

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksi	Judul	Menteri Dito Minta Pengelolaan Paskibraka Bisa Dikembalikan ke Kemenpora

Lead	Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Latar Informasi	Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP. Di sisi lain, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN)
Kutipan Sumber	Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo 1. “Polemik tentang pengelolaan pemilihan Paskibraka ini dari sejak rekrutmen sudah ramai. Dan memang kami memohon mungkin selanjutnya, sebaiknya ini paskibraka bisa kembali ke Kemenpora,” 2. “Dan itu sebenarnya tupoksi yang tepat untuk Kemenpora,”
Pernyataan Opini	Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini

	Penutup	Berita ditutup dengan Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.
Skrip	What	Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
	Where	Jakarta
	When	18 Agustus 2024
	Who	Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo
	Why	Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
	How	Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP. Di sisi lain, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN)
Tematik	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber

Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Terdapat foto Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo
----------------	-----------------------------------	--

(Sumber: Olahan Penelitian,2024)

Rincian Analisis:

1. Struktur Sintaksi

Berita dengan Judul Menteri Dito Minta Pengelolaan Paskibraka Bisa Dikembalikan ke Kemenpora Lead Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Latar Informasi Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP. Di sisi lain, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kutipan Sumber Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo 1. “Polemik tentang pengelolaan pemilihan Paskibraka ini dari sejak rekrutmen sudah ramai. Dan memang kami memohon mungkin selanjutnya, sebaiknya ini paskibraka bisa kembali ke Kemenpora,” 2. “Dan itu sebenarnya tupoksi yang tepat untuk Kemenpora,” Pernyataan Opini Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis berita atau wartawan pada artikel ini Penutup Berita ditutup dengan Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

2. Struktur Skrip

What Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Where Jakarta When 18 Agustus 2024 Who Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo Why Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta pengelolaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) bisa kembali ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). How Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP. Di sisi lain, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf soal adanya 18 anggota Paskibraka putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN)

3. Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat Susunan pada paragraph dari artikel tersebut menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan terdapat tanggapan dari beberapa narasumber.

4. Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik Terdapat foto Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo

4.3 Hasil Analisis Framing Pemberitaan di portal berita Cnnindonesia.com dan Kompas.com

Dari hasil rangkuman pada artikel Cnnindonesia.com dan Kompas.com secara keseluruhan ditemukan beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh Cnnindonesia.com dan Kompas.com mengenai pemberitaan kontroversi kasus paskibraka lepas hijab, peneliti menemukan bahwa pembingkaiian utama yang berusaha dibentuk oleh Cnnindonesia.com adalah detail dari sumber yang diberikan serta informasi tambahan seperti video yang ada di dalam artikel berita. Hal itu dibuktikan dari inti semua pemberitaan yang dianalisis menyatakan hal seperti itu. Pada struktur sintaksi berisi mengenai bagaimana tanggapan atau aksi dari pemerintah dalamanggapi kasus ini, tak hanya dari pemerintahan tetapi juga terdapat tanggapan dari orang tua paskibraka yang dipaksa untuk melepas hijab saat

sedang melakukan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Lead dari Cnnindonesia.com memberikan informasi yang cukup dan jelas bagi pembaca selaras dengan judul dari berita tersebut, sehingga pembaca memiliki rasa ingin tahu dan ingin membaca hingga selesai, Kutipan sumber yang dimuat oleh Cnnindonesia.com memberikan informasi utama serta terdapat penekanan dan penegasan terkait dengan pemberitaan tersebut.

Mengenai struktur skrip dalam memisahkan sebuah berita, dalam pemberitaan ini hampir sama dengan struktur dari sintaksi yaitu berisi mengenai bagaimana pendapat dan tanggap dari sumber terkait dengan kasus paskibraka lepas hijab upacara 17an di ikn. Opini-opini dari para sumber dengan jelas ditulis oleh penulis artikel dari Cnnindonesia.com sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi baru terkait dengan pemberitaan tersebut.

Pada struktur retorik Cnnindonesia.com sering kali memberikan gambar atau foto dengan jumlah yang sedikit, namun sesuai dengan headline berita yang ada, sehingga pembaca dapat membayangkan kondisi serta foto dari narasumber.

Sedangkan hasil rangkuman dari artikel Kompas.com secara keseluruhan artikel ditemukan beberapa hal dari pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas.com mengenai kontroversi paskibraka lepas hijab upacara 17 Agustus 2024. Judul berita pada Kompas memiliki judul yang di ambil dari kutipan narasumber atau tanggapan dari narasumber berbeda dengan Cnnindonesia yang memberikan judul secara tegas sehingga pembaca memiliki gambaran terkait dari pemberitaan tersebut. Kompas memiliki judul berita " Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati " yang dimana pada headline tersebut memberikan kutipan dari menag sedangkan pada Cnnindonesia memiliki judul " Jokowi Buka Suara soal Peluang Sanksi BPIP Buntut Jilbab Paskibraka " pada judul tersebut jelas Cnnindonesia menulis dengan tegas sehingga pembaca ingin mengetahui bagaimana isi dari berita yang sebenarnya.

Selanjutnya pada judul berita " Orang Tua Paskibraka Sulteng dan Maluku Sedih Lihat Anak Tak Berjilbab " pada Cnnindonesia.com memberikan tanggapan atau pandangan dari orang tua paskibraka sehingga Cnnindonesia memiliki beberapa tanggapan atau pendapat dari berbagai sumber.

Mengenai struktur Skrip dalam mengisahkan sebuah berita, dalam pemberitaan hampir sama dengan unsur sintaksi yaitu berisikan bagaimana tanggapan dan pendapat dari para sumber. 5W+1H yang disajikan oleh Cnnindonesia dan Kompas sangat lengkap dan jelas dikeseluruhan artikel. Pada struktur temarik dengan jelas ingin menekankan tanggapan para sumber terkait dengan kontroversi paskibaraka lepas hijab. Struktur retorik pada pemilihan gambar dan foto yang sesuai dengan judul dan isi berita sehingga pembaca akan mendapatkan pengalaman membaca dengan visual yang sesuai.

Dapat di simpulkan bahwa Cnnindonesia memiliki pembedaan berita yang menonjol dari segi informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa narasumber yang ada mulai dari pemerintah, menteri, presiden, orang tua, serta korban. Sedangkan Kompas memiliki pembedaan berita yang dapat dikatakan sama dengan Cnnindonesia, namun dengan penulisan judul yang berbeda dan narasumber yang sedikit atau pengelompokan yang sedikit.

Selanjutnya, penelitian ini sejak awal ditujukan untuk menganalisis pembedaan di portal berita Cnnindonesia dan Kompas terkait pemberitaan Kontroversi Paskibraka Lepas Hijab, dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa kedua media tersebut memiliki framing serta penulisan judul dan narasumber yang berbeda-beda dalam membingkai suatu berita. Pembedaan kedua situs berita tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.21 Tabel Perbandingan Analisis

Perangkat Framing	Cnnindonesia.com	Kompas.com
Sintaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan kata untuk judul berita yang informasi dengan detail serta memberikan inti dari berita 2. <i>Lead</i> yang memberikan inti dari pembahasan dari artikel itu sendiri 3. Kutipan sumber yang banyak disajikan <ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Presiden RI Joko Widodo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan kata judul berita yang menarik dan memberikan informasi secara garis besar dari isi berita 2. <i>Lead</i> yang digunakan deskriptif menjelaskan dengan jelas 3. Terdapat banyak kutipan sumber <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Ketua Majelis Hukum

<p>b. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo Keluarga</p> <p>c. ayah Zahra, Gatot Susilo Budianto Ketua Umum</p> <p>d. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah</p> <p>e. Ketua LP3HI Arif Sahudi</p> <p>f. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi</p> <p>g. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono</p>	<p>dan Hak Asasi 100 Latar Informasi Kutipan Sumber Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution</p> <p>b. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi</p> <p>c. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir:</p> <p>d. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas</p> <p>e. pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan</p> <p>f. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera</p> <p>g. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh</p> <p>h. Presiden Joko Widodo:</p> <p>i. Jokowi melalui Kepala Staf</p>
<p>4. Isi berita tergolong fokus pada kasus yang terjadi dan memberikan beberapa narasumber yang berbeda dalam satu artikel</p> <p>5. Penutup menegaskan bagaimana pembahasan selesai</p>	

		Kepresidenan, Moeldoko
		j. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono
		4. Penutup yang digunakan merupakan penakanan dari kutipan sumber
Skrip	<ol style="list-style-type: none"> Berita memuat 5W+1H dan lebih menonjolkan unsur what yaitu berisi mengenai apa yang terjadi pada pemberitaan Jurnalis telah melengkapi unsur 5W+1H yang menjelaskan fakta dengan menekankan unsur what didalam pemberitaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Berita 5W+1H yang menonjolkan what berisi mengenai informasi yang sesuai dengan headline Jurnalis telah melengkapi unsur 5W+1H yang menjelaskan fakta dengan menekankan unsur how didalam pemberitaan.
Tematik	<ol style="list-style-type: none"> Berita yang disusun memberikan informasi yang jelas terkait kasus parkibraka lepas hijab 	<ol style="list-style-type: none"> Berita yang disusun memberikan informasi yang faktual kepada pembaca
Retoris	<ol style="list-style-type: none"> Foto dan gambar ilustrasi sesuai dengan judul dan isi berita serta dapat memberikan penakanan kepada pembaca 	<ol style="list-style-type: none"> Foto dan gambar ilustrasi sesuai dengan judul dan isi berita serta dapat memberikan penakanan kepada pembaca

(Sumber: Olahan Penelitian, 2024)

Dari hasil analisis di atas menunjukkan beberapa perbedaan, yang menjadi temuan bagi peneliti dari media Cnnindonesia.com dan Kompas.com dalam pemberitaan Paskibraka lepas hijan upacara 17 Agustus 2024 di IKN, dalam struktur sintaksi terdapat beberapa perbedaan antara kedua media tersebut dalam memuat berita tersebut, perbedaan pertama yaitu Cnnindonesia.com terlihat dalam penulisan judul berfokus pada pandangan dari pemerintah atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti judul berita " Kepala BPIP Minta Maaf,

Bolehkan Paskibraka Pakai Jilbab saat Upacara " dan beberapa headline judul yang menyebutkan organisasi pemerintahan, serta terdapat pandangan dari orang tua paskibraka.

Dari kutipan sumber Kompas.com hanya menggunakan kutipan dari pemerintah saja berbeda dengan cnn yang terdapat kutipan dari ketua organisasi serta orang tua dari paskibraka

Sedangkan pada media Kompas.com penulisan headline berita berfokus pada tanggapan dari pemerintahan terkait dengan berita tersebut seperti judul " Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati " selain itu Kompas tidak memiliki berita pandangan dari orang tua paskibraka.

Dapat disimpulkan kedua media yang telah dianalisis, telah ditemukan perbedaan framing terhadap keduanya. Cnnindonesia mencoba memberikan pendapat informasi serta narasumber yang lengkap dan banyak sedangkan Kompas.com memiliki headline berita serta penulisan berita yang tegas namun sedikit narasumber.